

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan suatu perusahaan dapat dipengaruhi dan atau bergantung oleh beberapa aspek, salah satu aspek yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan pelaporan laporan keuangan secara tepat waktu. Peraturan persyaratan pelaporan keuangan dan persyaratan minimal isi laporan keuangan sudah diatur didalam SAK 2021. Adapun komponen laporan keuangan lengkap menurut SAK 2021 meliputi laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, dan laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia IAI (2017), tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Informasi laporan keuangan akan sangat bermanfaat apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu untuk pengguna informasi seperti investor, kreditor, pemerintah, masyarakat dan pihak yang berkepentingan seperti manajemen perusahaan.

Informasi yang relevan akan bermanfaat bagi para pemakai apabila tersedia tepat waktu antara penyajian informasi yang diinginkan dengan frekuensi pelaporan informasi. Apabila informasi tidak disampaikan dengan tepat waktu akan menyebabkan informasi tersebut kehilangan nilai di dalam mempengaruhi kualitas keputusan IAI (2002).

Begitu signifikannya nilai tepat waktu dari pelaporan laporan keuangan terhadap manfaat laporan keuangan itu sendiri sehingga mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi khusus yang tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 yang berisi bahwa Emiten atau Perusahaan

Publik wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 hari setelah tahun buku berakhir. Dalam hal ini, jika Emiten atau Perusahaan Publik menyampaikan Laporan Tahunan melewati batas waktu, Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis hingga pencabutan izin usaha.

Peran auditor sangat diperlukan terutama dalam mencegah terjadinya kesalahan penyajian laporan keuangan, hal itu penting mengingat kesalahan sedikit saja dapat menjadi risiko yang akan menyebabkan terjadinya penyimpangan dalam pelaporan keuangan. Menurut SPAP, auditor harus merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisme profesional mengingat kondisi tertentu dapat saja terjadi yang menyebabkan laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material.

Ketepatan waktu penyampaian laporan audit adalah salah satu kriteria profesionalisme dari auditor. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu penerbitan laporan keuangan audit merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan publik. Ketepatan waktu ini terkait dengan realisasi bukti laporan keuangan itu sendiri.

Guntur *et.al.*, (2021) mengungkapkan bahwa keterlambatan penyampaian laporan keuangan biasanya dapat disebut sebagai *audit delay* atau *audit report lag*, audit delay merupakan rentang waktu antara diterbitkannya laporan keuangan dengan tanggal penutupan tahun buku. Pentingnya audit delay suatu laporan keuangan menuntut auditor agar menyelesaikan pekerjaannya secara tepat waktu. Ketepatan waktu pelaporan membuat adanya tantangan bagi auditor di perusahaan *go public* dikarenakan proses audit merupakan proses yang membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk mengidentifikasi masalah yang ada di dalam perusahaan, selain itu diperlukan ketelitian dalam menemukan bukti-bukti audit.

Lamanya waktu penyelesaian pekerjaan waktu audit di indikasikan dari perbedaan waktu antara tanggal pelaporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan. Hal yang paling penting dalam penyelesaian kerjaan audit adalah bagaimana agar dalam penyajian laporan keuangan itu bisa tepat waktu atau tidak terlambat dan kerahasiaan informasi terhadap laporan keuangan tidak bocor pada pihak lain. Sedangkan pada penelitian ini penulis mengambil studi empiris pada perusahaan transportasi yang terdaftar pada BEI periode 2018 sampai dengan 2021.

Tabel 1.1 Daftar perusahaan sektor transportasi yang mengalami audit delay

| No. | Kode Perusahaan | Nama Perusahaan | Audit Delay | | | Jumlah Audit Delay |
|-----|-----------------|-----------------------------------|-------------|------|------|--------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | |
| 1 | ASSA | PT Adi Sarana Armada Tbk. | 86 | 82 | 104 | 1 |
| 2 | BLTA | PT Berlian Laju Tanker Tbk | 59 | 148 | 151 | 2 |
| 3 | AKSI | PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk | - | 148 | 144 | 2 |
| 4 | CMPP | PT AirAsia Indonesia Tbk | 67 | 210 | 151 | 2 |
| 5 | HELI | PT Jaya Trishindo Tbk | 81 | 66 | 95 | 1 |
| 6 | MIRA | PT Mitra International Resources | 81 | 84 | 143 | 1 |

sumber : www.idx.co.id

Tabel 1.1 diatas memberikan informasi mengenai perusahaan-perusahaan di sektor transportasi yang mengalami audit delay pada periode tahun 2018 sampai 2020. Terdapat enam perusahaan yang mengalami audit delay, tiga diantaranya pernah mengalami audit delay lebih dari satu kali. Perusahaan tersebut yaitu PT Berlian Laju Tanker Tbk yang telah dua kali mengalami audit delay untuk tahun 2019 dan 2020, PT Mineral Sumberdaya Mandiri Tbk yang mengalami audit

delay sebanyak dua kali di tahun 2019 dan 2020, serta PT AirAsia Indonesia Tbk yang mengalami audit delay di tahun yang sama yaitu 2019 dan 2020.

Sedangkan untuk perusahaan yang mengalami audit delay hanya satu kali yakni ada PT Adi Sarana Armada untuk periode tahun 2020, PT Jaya Trishindo Tbk untuk tahun 2020, dan PT Mitra International Resources untuk tahun 2020.

Dari fenomena yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan jumlah audit delay pada tahun 2019 dan 2021. Hal ini tentu saja menjadi perhatian bagi pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat memberikan sanksi bagi perusahaan-perusahaan yang melanggar ketentuan.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya audit delay, yaitu diantaranya komite audit, pertumbuhan perusahaan dan ukuran KAP. Berdasarkan peraturan OJK No. POJK 55/POJK.04/2015 Pasal 1 (1) komite audit merupakan komite yang disusun dan dibentuk oleh dewan komisaris sebagai penunjang untuk membantu melaksanakan dan memudahkan tugas dewan komisaris itu sendiri. Yang menjadi tugas pokok dari komite audit adalah melakukan penelitian atau review terhadap resiko yang kemungkinan akan dihadapi perusahaan terutama dalam pengendalian internal audit.

Faktor selanjutnya yaitu pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan dapat diukur dari seberapa besar perubahan yang diberikan oleh manajemen dan bagaimana pertumbuhan penjualan di perusahaan tersebut. Peningkatan penjualan menjadi indikator yang menandakan perusahaan tersebut dapat tumbuh atau tidak di setiap tahun berjalan. Jika perusahaan mengalami peningkatan didalam penjualan maka menandakan perusahaan tersebut akan mendapatkan keuntungan yang tinggi dan begitu pun sebaliknya.

Ukuran Kantor Akuntan Publik menurut Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) tahun 2015 terbagi menjadi 5 (lima) yaitu KAP Kecil, KAP Menengah, KAP Besar, KAP Sangat Besar dan KAP *Big Seven*. Selain itu, Ukuran Kantor Akuntan Publik di kelompokkan menjadi dua yaitu KAP *Big Seven* dan *non Big Seven*, kedua ukuran KAP tersebut memiliki karakteristik dan

pengaruh yang berbeda terhadap audit delay. KAP *Big Seven* umumnya memiliki sumber daya yang lebih banyak dan lebih besar dalam segi kompetensi, keahlian, dan kemampuan auditor maupun fasilitas, sistem, dan prosedur pengauditan daripada KAP *non Big Seven*. Sehingga perusahaan yang tergabung dalam KAP *Big Seven* diyakini dapat bekerja lebih kompeten dan berpengalaman dalam melakukan audit dari pada KAP *non Big Seven*.

Menurut penelitian yang dilakukan Sulmi, *et.al.*, (2020) dan Umami (2020), komite audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap audit delay. Serta penelitian yang dilakukan oleh Prianti dan Surya (2022) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Hal tersebut dikarenakan waktu penyelesaian proses pengauditan tidak tergantung dari banyaknya jumlah komite audit yang ada. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Adhika dan Gede (2016), Purnami (2019) serta Verawati (2016) yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap audit delay dikarenakan komite audit tidak berperan secara langsung di dalam penyusunan laporan audit melainkan hanya bersifat sebagai pengawas dalam penyusunan laporan auditor independen.

Menurut penelitian yang dilakukan Nurlis (2014), Ernayani (2020) dan Anggriyani (2020), pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay dikarenakan apabila pertumbuhan perusahaan melambat, hal itu mengindikasikan perusahaan tersebut sedang dalam kinerja yang tidak baik sehingga penyampaian laporan audit mengalami keterlambatan penyampaian. Hal itu berbeda dengan penelitian yang disampaikan Sinarto (2021), Lailatun (2021) dan Nyoman (2021) yang menyatakan bahwa pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap audit delay karena semakin tinggi pertumbuhan bisnis di suatu perusahaan, maka semakin pendek pelaporan laporan keuangan audit.

Penelitian yang dilakukan Amin, *et.al.*, (2020), Larasati (2017) serta Utami (2018) menyatakan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap audit delay hal itu dikarenakan perusahaan yang menggunakan KAP yang bukan dari *Big Seven* juga memiliki audit delay yang hampir sama dengan perusahaan yang menggunakan KAP *Big Seven*. Sedangkan menurut Clarissa dan Pangerapan

(2019), Putri (2019) dan Permatasari (2019), Ukuran KAP berpengaruh positif terhadap audit delay. Hal ini disebabkan karena Kantor Akuntan Publik yang bekerjasama dengan KAP *Big Seven* memiliki auditor dan karyawan yang banyak dan handal, sehingga dapat bekerja secara efisien dan mempercepat proses audit dibanding dengan KAP yang *non Big Seven*.

Dari uraian diatas, digambarkan bahwa adanya perbedaan hasil pada penelitian dan juga adanya perbedaan jenis sektor perusahaan untuk variable yang sama, mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor yang menjadi indikator dalam audit delay suatu perusahaan. Beberapa faktor yang diindikasikan dapat memengaruhi audit delay dalam penelitian terdahulu antara lain: Komite Audit, Pertumbuhan Perusahaan dan Ukuran KAP. Faktor-faktor tersebut perlu diperhatikan secara seksama agar publikasi laporan keuangan yang telah diaudit menjadi tepat waktu.

Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti mengambil judul **“Pengaruh Komite Audit, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran KAP Terhadap Audit Delay (Pada Perusahaan Transportasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia periode 2018 - 2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Apakah komite audit yang diproyeksikan oleh perhitungan jumlah komite audit perusahaan berpengaruh terhadap Audit Delay?
2. Apakah Pertumbuhan Perusahaan yang diproyeksikan oleh presentase selisih penjualan berpengaruh terhadap Audit Delay?
3. Apakah ukuran KAP yang diproyeksikan KAP *Big Seven* dan KAP *non Big Seven* berpengaruh terhadap Audit Delay?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Komite Audit terhadap Audit delay.

2. Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Perusahaan terhadap Audit Delay.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran KAP terhadap Audit Delay.
4. Untuk mengetahui pengaruh komite audit, pertumbuhan perusahaan, dan ukuran KAP terhadap Audit Delay.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pemahaman mengenai Komite Audit, Pertumbuhan Perusahaan, dan Ukuran KAP terhadap Audit Delay serta sebagai sarana dalam memperluas ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai auditing, terutama dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang menjadi aspek penting dan menjadi perhatian pemerintah.

2. Manfaat Bagi Investor

Dapat memberikan wawasan dan masukan bagi calon investor maupun investor lama dalam proses pengambilan keputusan untuk dapat berinvestasi di suatu perusahaan khususnya di perusahaan sector transportasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Manfaat Bagi Pembuat Kebijakan

Pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dirasa perlu memberikan tindakan pencegahan agar keterlambatan penyampaian laporan keuangan dapat dikendalikan, serta agar perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya.

4. Manfaat Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan dalam membuat kebijakan, mempersingkat rentang waktu audit, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dengan mencermati faktor-faktor dominan yang mempengaruhi audit delay.